

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.192, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Visa. Paspor. Dinas.
Indonesia - Kyrgyzstan. Pembebasan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 23 September 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kyrgyz Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kyrgyzstan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kyrgyz Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 September 2011 di New York, Amerika Serikat, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Kyrgyz, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Kyrgyz, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan, selanjutnya disebut "**Para Pihak**",

MENIMBANG hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan tersebut lebih lanjut, secara timbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas Republik Indonesia dan Republik Kyrgyzstan ke masing-masing negara;

SESUAI dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1
Pembebasan Visa**

Warga negara Republik Indonesia dan Republik Kyrgyzstan, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah negara Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

**Pasal 2
Masa Berlaku Paspor yang Sah**

Masa berlaku paspor diplomatik dan dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

**Pasal 3
Pembatasan Visa**

Pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah dari Para Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini dapat memasuki, mengunjungi

dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya di setiap titik yang diizinkan oleh pihak imigrasi yang berwenang tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas tersebut.

Pasal 4

Visa Bagi Anggota Misi Diplomatik dan Konsuler

Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah merujuk kepada Pasal 1 persetujuan ini, ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (anggota keluarga merujuk kepada suami/istri, anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun, belum menikah dan tidak bekerja, serta orang tua yang ditanggung), wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

Pasal 5

Hak Penolakan

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

Pasal 6

Hak Pihak Berwenang

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara Para Pihak dari kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan Pihak lainnya ketika memasuki wilayah Pihak lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perundang-undangan yang berkenaan dengan masuk, tinggal dan perginya orang asing.
2. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang berlaku di kedua belah pihak terkait dengan keamanan internal dan masuk, tinggal dan pergerakan orang asing.

Pasal 7

Tempat-tempat Pemeriksaan Masuk dan Keberangkatan

Warga negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik atau dinas, wajib memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lain melalui tempat-tempat pemeriksaan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

Pasal 8 Penangguhan

1. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan Persetujuan ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Pasal 9 Contoh dan Penerbitan Paspor atau Dokumen Perjalanan

1. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di wilayah tersebut melalui misi diplomatik atau kantor konsuler negaranya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut.

Pasal 10 Penyelesaian Sengketa

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan Para Pihak.

Pasal 11 Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Ayat 1 dari Pasal 12 Persetujuan ini, dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini.

Pasal 12
Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di New York pada tanggal 23 September tahun 2011, rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Kyrgyz dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA


Y.M. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
KYRGYZSTAN


Y.M. Kazakbaev Ruslan Aitbaevich
Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

**ИНДОНЕЗИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ЖАНА
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ОРТОСУНДАГЫ
ДИПЛОМАТИЯЛЫК ЖАНА КЫЗМАТТЫК ПАСПОРТТОРДУН
ЭЭЛЕРИ ҮЧҮН ВИЗАСЫЗ ТАРТИП ОРНОТУУ ЖӨНҮНДӨ
МАКУЛДАШУУ**

Мындан ары "Тараптар" деп аталуучу Индонезия Республикасынын
Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

эки өлкөнүн ортосундагы достук мамилелерди эске алуу менен;

Индонезиянын жана Кыргызстандын дипломатиялык жана
кызматтык паспортко ээ болгон жарандары үчүн эки өлкөгө кирүүнү
жөнөкөйлөтүү аркылуу эки тараптуу мамилелерди мындан ары күчөтүү
ниетин билдирүү менен;

Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарына жана эрежелерине
ылайык;

төмөндөгүлөр жөнүндө келишимге келишти:

1-БЕРЕНЕ

ВИЗА АЛУУДАН БОШОТУУ

Индонезия Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын
жарактуу дипломатиялык же кызматтык паспортко ээ болгон жарандары
экинчи Тараптын аймагына 30 күндөн ашпаган мезгилге кирүү, транзит
менен өтүү жана ал аймакта жүрүү үчүн виза алуу талаптарынан
бошотулат.

2-БЕРЕҢЕ**ПАСПОРТТУҢ ЖАРАКТУУ МӨӨНӨТҮ**

Ар бир Тараптын мамлекетинин жарандарынын дипломатиялык жана кызматтык паспортторунун жарактуу мөөнөтү экинчи Тараптын өлкөсүнө кирген күнгө чейин кеминде 6 (алты) айды түзүшү керек.

3-БЕРЕҢЕ**ВИЗАЛЫК ЧЕКТӨӨ**

Ар бир Тараптын жарактуу дипломатиялык же кызматтык паспортторунун ээлери бул Макулдашуу боюнча Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарында каралган жана дипломатиялык жана кызматтык паспорттордун ээлерине колдонулушу мүмкүн болгон коопсуздук, миграция, бажы жана санитардык чектөөлөрдөн тышкары компетенттүү органдар аркылуу жактырылган пункттар аркылуу кирип-чыгууга, аймакта жүрүүгө укуктуу.

4-БЕРЕҢЕ**ДИПЛОМАТИЯЛЫК ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРДҮН ЖАНА КОНСУЛДУК
МЕКЕМЕЛЕРДИН МҮЧӨЛӨРҮ ҮЧҮН ВИЗА**

Тараптардын бул Макулдашуунун I-статьясында каралаган дипломатиялык же кызматтык паспортторуна ээ, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн же консулдук мекемелердин мүчөлөрү катары дайындалган жарандары жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү (“үй-бүлө мүчөлөрү” термини күйөөсүнө/аялына жана ата-энесинен көз каранды, иштебеген, үйлөнө элек/турмушка чыга элек 25 жашка чейинки балдарына жана көз каранды ата-энелерине тиешелүү) экинчи Тараптын өлкөсүнүн аймагына кирүүдөн мурда экинчи Тараптын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө же консулдук мекемелеринде кирүү визасын алуусу керек.

5-БЕРЕҢЕ**БАШ ТАРТУУ УКУГУ**

Ар бир Тарап ушул Макулдашуунун алкагында виза алуудан бошотулган жаранды жагымсыз деп эсептесе, анда мындай жаранга аймакка кирүүгө уруксат берүүдөн баш тарта алат же аймакта туруу мөөнөтүн кыскартууга жана бул Макулдашуунун алкагында визадан бошотууну алып салууга укуктуу.

6- БЕРЕҢЕ**РАСМИЙ ОРГАНДЫН УКУГУ**

1. Бир Тараптын жарандары экинчи Тараптын аймагында кирүүдө, чыгууда жана аймакта болууда ошол мамлекеттин мыйзамдарын урматтоого милдетүү.

2. Бул Макулдашуу эки Тараптын тең ички коопсуздугуна жана чет өлкөлүк жарандардын кирүү, чыгуу жана аймакта туруусуна же жер которуусуна тиешелүү иштеп жаткан мыйзамдарын же ченемдик документтерине таасирин тийгизбейт.

7-БЕРЕҢЕ**КИРҮҮ ЖАНА ЧЫГУУ КӨЗӨМӨЛ-ӨТКӨРМӨ ЖАЙЫ**

Тараптардын мамлекеттеринин дипломатиялык же кызматтык паспортторго ээ жарандары экинчи Тараптын өлкөсүнүн аймагына эл аралык жүргүнчүлөр үчүн ачылган көзөмөл-өткөрмө жайы аркылуу киришет жана чыгышат.

8- БЕРЕНЕ**МАКУЛДАШУУНУН КОЛДОНУЛУШУН УБАКТЫЛУУ ТОКТОТУУ**

1. Ар бир Тарап улуттук коопсуздук, коомдук тартип же коомдук саламаттыкты сактоо себептери боюнча ушул Макулдашуунун ишин толугу менен же жарым-жартылай убактылуу токтото алат.
2. Ар бир Тарап бул берененин 1-пунктунда көрсөтүлгөн убактылуу токтотуу жөнүндө тез аранын ичинде дипломатиялык каналдар аркылуу кабардар болушу керек.

9- БЕРЕНЕ**ПАСПОРТТУН ҮЛГҮСҮ ЖАНА ПАСПОРТТОРДУ ЖЕ ЖОЛДО
ЖҮРҮҮНҮН ДОКУМЕНТТЕРИН БЕРҮҮ**

1. Тараптар бул Макулдашууга кол коюлган күндөн баштап отуз (30) күн ичинде дипломатиялык каналдар аркылуу дипломатиялык жана кызматтык паспорттордун үлгүлөрү менен алмашышат.
2. Жаңы дипломатиялык жана кызматтык паспорттор чыгарылса же колдонуудагы паспортторго өзгөртүүлөр киргизилсе, Тараптар алардын ишке киришине отуз (30) күн калганга чейин дипломатиялык каналдар аркылуу жазуу түрүндө бири-бирине билдиришет.
3. Тараптын жараны башка Тараптын аймагында дипломатиялык же кызматтык паспортун жоготуп жиберсе же булгап алса, өз мамлекетинин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери аркылуу тез аранын ичинде келген мамлекеттин компетенттүү органдарына билдирет. Дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери өз мамлекетинин мыйзамына ылайык ал жарандарга тиешелүү мамлекетке кайтуусу үчүн тийиштүү документ берет.

10- БЕРЕҢЕ**ТАЛАШ-ТАРТЫШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ ТАРТИБИ**

Макулдашууну талкуулоодо же пайдаланууда келип чыккан кайчы пикирлер Тараптар ортосунда тынч, консультацияларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүү аркылуу чечилет.

11- БЕРЕҢЕ**ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ**

Бул Макулдашуу Тараптардын өз ара жазуу жүзүндөгү макулдашуусу аркылуу өзгөртүлүшү же кайра каралышы мүмкүн. Мындай өзгөртүү же кайра кароо ушул макулдашуунун 12-беренесинин 1-пунктуна ылайык күчүнө кирет жана ушул Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет.

12-БЕРЕҢЕ**КҮЧҮНӨ КИРИШИ, ИШТӨӨ МӨӨНӨТҮ ЖАНА
ТОКТОТУЛУШУ**

1.Бул Макулдашуу Тараптардын ар бири анын күчүнө кириши үчүн бардык жол-жоболорду аткаргандыгы жөнүндө акыркы билдирүү дипломатиялык каналдар аркылуу алынгандан кийин 30 (отуз) күндөн соң күчүнө кирет.

2. Бул Макулдашуу 5 (беш) жыл ичинде өз күчүндө болот жана Тараптардын өз ара жазуу жүзүндөгү макулдашуусу менен кийинки 5 (беш) жылга узартылышы мүмкүн, ошол эле убакта Тараптардын ар бири экинчи Тарапка дипломатиялык каналдар аркылуу Макулдашууну токтотууга кеминде 3 (үч) ай калганда жазуу жүзүндөгү билдирүү жөнөтүү аркылуу ушул Макулдашуунун колдонулушун токтото алат.

Муну ырастоо үчүн, Тараптардын Өкмөттөрүнүн ыйгарымдуу өкүлдөрү ушул Макулдашууга кол коюшту.

Нью-Йорк шаарында 2011-жылдын 23-сентябрында эки нускадагы индонезия, кыргыз жана англис тилдеринде түзүлдү, бардык тексттер бирдей юридикалык күчкө ээ. Макулдашуунун жоболорун талкуулоодо кайчы пикирлер келип чыкса, англис тилиндеги текст артыкчылыкка ээ болот.

**Индонезия Республикасынын
Өкмөтү үчүн**


Индонезия Республикасынын
Тышкы иштер министри
Марти Натаlegaва

**Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү үчүн**


Кыргыз Республикасынын Тышкы
иштер министри
Руслан Казакбаев



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
SERVICE PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kyrgyz Republic hereinafter referred to as «the Parties»;

Considering the existing friendly relations between the two countries;

Desiring to further strengthen such relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of nationals of Kyrgyzstan and Indonesia, holders of diplomatic and service passports, into each other country;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of respective countries;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
Visa exemption**

Nationals of the Republic of Indonesia and nationals of the Kyrgyz Republic, holding valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of either Party for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of each entry.

**ARTICLE 2
Duration of passport validity**

The duration of diplomatic and service passports validity of nationals of the country of either Party shall be at least 6 (six) month on the date of entry into the territory of the country of the other Party.

**ARTICLE 3
Visa Restriction**

Holders of the valid diplomatic or service passport of either Party referred to this Agreement may enter into, visit and depart from any place and point of

the respective country, which is permitted by its competent authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, customs and sanitary provisions and other which may be legally applicable to holders of diplomatic and service passports.

ARTICLE 4

Visa for members of diplomatic and consular missions

Nationals of the country of either Party, holders of valid diplomatic or service passport referred to Article 1 of this Agreement, assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the country of other Party, including their family members (the term «family members» refers to husband/wife, unmarried children under the age of 25 years and who are unemployed, and dependent parents), shall be required to obtain appropriate entry visa from the diplomatic or consular mission of the other Party prior to the entry.

ARTICLE 5

Rights of refusal

Either Party reserves the rights to refuse admission of entry, shorten or end the duration of stay of nationals of the country of the other Party entitled to visa exception and facilities under this Agreement if it considers that person is found to be undesirable.

ARTICLE 6

Rights of authorities

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party from the obligation to respect the laws and regulations of the other Party when entering into the territory of the other Party, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners.
2. This Agreement does not affect the applicable laws and/or regulations of both Parties relating to internal security and the entry, stay or movement of foreigners.

ARTICLE 7

Check points of entry and departure

Nationals of the country of either Party, holders of diplomatic or service passports, shall enter into and depart from the territory of the country of the other Party through check-points open for international passenger traffic.

ARTICLE 8**Suspension**

1. Each Party may suspend this Agreement either in whole or in part, for reasons of national security, public order or public health.
2. The introduction, as well as termination of the measures referred to in paragraph 1 of this Article shall immediately be notified to the other Party through diplomatic channels.

ARTICLE 9**Specimen and issuance of passports or travel documents**

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, within 30 (thirty) days after signing of this Agreement, the specimens of their valid diplomatic and service passports.
2. In case of introduction of new diplomatic or service passports, as well as, modifications of the existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.
3. In case of nationals of either Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the country of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving state through diplomatic mission or consular office of the state of their nationality. The diplomatic mission or consular office concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their state, a document for returning to the state of their nationality.

ARTICLE 10**Settlement of disputes**

Any difference or dispute arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 11**Amendments**

This Agreement may be amended or revised at any time by mutual consent in writing of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the provisions of paragraph 1 of Article 11 of this Agreement and form as an integral part of this Agreement.

ARTICLE 12**Enter into force duration and termination**

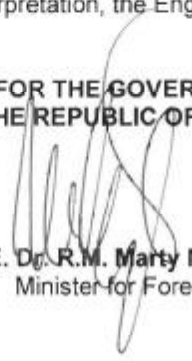
1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the receipt of the last notification in which the Parties notify each other, through diplomatic channels, that their internal requirement for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed consecutively for further period of 5 (five) years by mutual consent of the Parties in writing, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party, through diplomatic channels, at least 3 (three) month prior to the expected termination date.

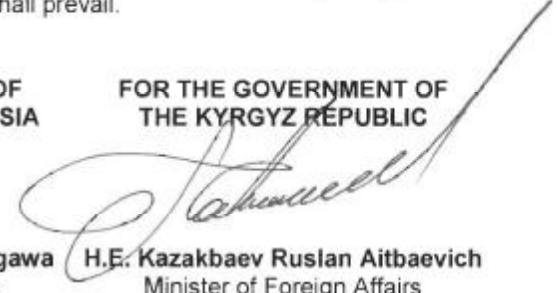
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at New York on this 23rd day of September in the year two thousand and eleven in duplicate in the Kyrgyz, Indonesian and English languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE KYRGYZ REPUBLIC**


H.E. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa
Minister for Foreign Affairs


H.E. Kazakbaev Ruslan Aitbaevich
Minister of Foreign Affairs